

**Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam
Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan
Haruai, Kabupaten Tabalong**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh :

Muhammad Nauval

NIM. 2206 3201 3497

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN
NON TUNAI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
DESA HALONG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN
TABALONG**

A. Nama mahasiswa : Muhamamd Nauval

NIM : 2206 3201 3497

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

B. Disetujui Oleh

Pembimbing : Heni Suparti S.AP., M.A.P. (.....)

NIDN : 1129118902

Penguji I : Drs. H. Wahyu Subadi, M.Si (.....)

NIDK : 8882511019

Penguji II : H. Jamaludin, S.E., M.A.P (.....)

NIDK : 8845930017

C. Dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~ dalam mempertahankan ujian skripsi

pada tingkat Stara Satu (S-1) pada tanggal 28 Juli 2024

Tanjung, 28 Juli 2024

Mengetahui :

Ketua STIA Tabalong,

Ketua Prodi,

Hj. Rahmi Hayati, S.Sos., M.A.P
NIK. 005 057 012

Lilis Suryani, S.AP., M.A.P
NIK. 005 057 058

LEMBAR PERSETUJUAN

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN
NON TUNAI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI DESA HALONG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN
TABALONG**

Oleh:

Muhammad Nauval

NIM : 2206 3201 3497

Tanjung, 28 Juli 2024

HENI SUPARTI S.A.P.,M.A.P

NIDN: 1129118902

PEMBIMBING

PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nauval
NIM : 2206 3201 3497
Jurusan : Administrasi Negara/Publik
Judul : Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan
Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten
Tabalong

Menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjung, 28 juli 2024

Muhammad Nauval
NIM. 2206 3201 3497

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kepada Ketua STIA Tabalong Ibu Hj. Rahmi Hayati, S.Sos., M.A.P ,seterusnya Ketua Program Studi Administrasi Publik STIA Tabalong Ibu Lilis Suryani, S.AP., M.A.P. dan seterusnya Ibu Heni Suparti S.AP.,M.A.P., selaku Dosen Pembimbing, Bapak Drs. H. Wahyu Subadi, M.Si selaku dosen penguji I, Bapak H. Jamaludin, S.E., M.A.P selaku dosen penguji II, dan seluruh Dosen STIA Tabalong yang telah membantu memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan selama perkuliahan. Bapak H. Zainal Firdaus selaku kepala desa Halong serta staf desa Halong yang telah ikut serta membantu melaksanakan penelitian ini, serta kepada pendamping BPNT, rekan rekan dan warga desa Halong yang telah banyak memberikan bantuan ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Terimakasih yang dalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, atas dorongan yang kuat serta doa yang dipanjatkan.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada seluruh keluarga dan kerabat serta orang yang terdekat yang selalu mendukung dalam proses penelitian ini.

Tanjung, 28 juli 2024

Muhammad Nauval
NIM. 2206 3201 3497

RINGKASAN

Muhammad Nauval, NIM 220632013497 Program Studi Strata 1 Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Tahun 2024, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Tujuan dari bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi yang lebih seimbang.

Peneliti menetapkan tujuan penelitian Untuk mengalisis Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum mengenai fenomena sosial yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh. Maka dalam penelitian ini peneliti berusaha memperoleh gambaran yang konkret mengenai fenomena yang terjadi terkait Evaluasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa Halong Kecamatan Haruai.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Halong, Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dapat dikategorikan sebagai program yang baik. Program ini berhasil mencapai tujuannya dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengurangi beban ekonomi.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, BPNT, Kemiskinan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayat, dan inayahnya kepada saya sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong”** bisa diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Skripsi ini memang masih jauh dari sempurna, saya selaku manusia biasa tentu masih memiliki berbagai kekurangan. Selama proses penyusunannya tidak sedikit kendala dan hambatan saya hadapi.

Namun, berkat dukungan dan bantuan yang diberikan berbagai pihak pada akhirnya Skripsi ini dapat saya selesaikan. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Heni Suparti S.AP., M.A.P selaku dosen pembimbing saya.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik yang membangun serta saran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini diterima dan memberi manfaat kepada berbagai pihak.

Haruai, 28 Juli 2024

Muhammad Nauval

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitan Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	17
C. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sampel Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik analisis Data.....	42
F. Jadwal Penelitian.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Data.....	45
B. Temuan Penelitian.....	54
C. Pembahasan.....	94
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	107
PEDOMAN WAWANCARA.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 penerima Program Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Halong Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong 2024.....	6
Tabel 4. 1 Persebaran Penduduk	46
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil Penelitian	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Posisi Penelitian Evaluasi Dalam Proses Kebijakan Publik.....	21
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	39
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data Kualitatif.....	43
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Halong.....	45
Gambar 4. 2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Halong.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran foto 1. 1 Wawancara Dengan Sekretaris Desa.....	107
Lampiran foto 1. 2 Wawancara Dengan Pendamping BPNT	107
Lampiran foto 1. 4 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 1	108
Lampiran foto 1. 3 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 2	108
Lampiran foto 1. 6 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 3	109
Lampiran foto 1. 5 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 4	109
Lampiran foto 1. 7 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 5	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataannya memperlihatkan bahwa sampai saat ini di Indonesia belum bisa melepaskan diri dari belenggu masalah kemiskinan (Kompas 2022). Secara sosiologi masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik (Kompas 2023).

Sejak era krisis ekonomi Tahun 1998, program Bantuan Sosial (Bansos) secara berkelanjutan tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab Pemerintah. Pada awalnya bansos diciptakan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi, rawan pangan, berkurangnya kesempatan kerja, berkurangnya penyediaan fasilitas sosial bidang kesehatan dan pendidikan, dan menurunnya ekonomi masyarakat. (Sri Lestari Rahayu 2012)

Dengan kondisi tersebut timbul masalah ekonomi, seperti kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara – negara berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah singkat. (Drs. H. Hartomo, dkk 2004)

Kemiskinan adalah salah satu fenomena sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Secara pengertian, menurut Badan Pusat Statistik (BPS),

kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Penentuan dan pengukuran kemiskinan didasarkan pada pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika rata – rata pengeluaran per kapita bulannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan bisa berubah seiring waktu karena penentuan garis kemiskinan dihitung berdasarkan berbagai faktor. Pada September 2022, garis kemiskinan di Indonesia adalah Rp 535.547/kapita/bulan. (kompas, 2023).

Meski garis kemiskinan di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan di tahun 2022 yakni sebesar Rp573.018/kapita/bulan, namun angka kemiskinan pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 5,87% atau sekitar 15.243 jiwa. Hal itu sebagaimana diungkapkan Bupati Tabalong Dr Drs Anang Syakhfiani M.Si, dalam pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun anggaran 2022. (Kalimantanpost, 2023)

Mulai 2017 lalu, pemerintah bertahap mentransformasikan penyaluran bansos dari RASTRA menjadi BPNT. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos sehingga lebih cepat sasaran serta mendorong tercapainya keuangan inklusif di masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. (Kemenkopmk RI, 2019)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Tujuan dari bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan

memberikan gizi yang lebih seimbang. Adapun manfaat yang di peroleh dari BPNT yaitu;

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan Program Gerakan Nasional Non Tunai yang digagaskan oleh Bank Indonesia;
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI)
- d. Meningkatnya efesiensi penyaluran bantuan sosial; dan
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah , terutama usaha miko dan kecil di bidang perdagangan. (kecamatancimpea.bogorkab.go.id)

Peneliti membahas mengenai program Bantuan Non Tunai sesuai dengan judul penelitian karena program Bantuan Non Tunai merupakan bantuan sosial secara non tunai dan tidak bisa di cairkan secara tunai sehingga bantuan tersebut tidak di salahgunakan.

Menurut Pebi Julianto dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pada awalnya, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (2017), menjelaskan bahwa pergantian program Rastra Menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa

permasalahan yang cukup kompleks yaitu: pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang mana masih di temukan Exclusion Error dan Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, inclusion error sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

Dasar hukum Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Secara Non Tunai
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang strategi nasional Keuangan Inklusif
3. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga
4. Peraturan menteri sosial nomor 10 tahun 2017 tentang program keuangan keluarga harapan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 pasal 1 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial “ Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya dan

berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha – usaha kesejahteraan sosial”. (UU RI No. 6 Th. 1974 pasal 1 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial).

Sumber data dan penerima Bansos Pangan antara lain adalah; Keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos pangan adalah keluarga dengan kondisi sosial dengan ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM bansos Pangan adalah data terpadu program penanganan fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015. DT-PPFM dikelola oleh; kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin (POKJA DATA), yang dibentuk melalui SK Mensos No. 284/HUK/2016 tanggal 21/9/2016, yang diperbaharui melalui SK mensos No.30//HUK/2017. Pokja Data terdiri dari; Kemenko PMK, kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos, badan Pusat statistik (BPS), dan Sekretaris TNP2K (Kementrian Sosial).

Rohana Tiara, Mardianto (2019) Kriteria masyarakat bisa mendapatkan bantuan ini adalah

- a. Keluarga yang pendapatan rendah
- b. Tidak punya penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan
- c. Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari
- d. Rumah kondisi yang tidak layak huni

Tabel 1. 1 penerima Program Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Halong Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong 2024.

No	Jumlah Masyarakat Miskin	Penerima BPNT
1.	428 Jiwa	395 KK

(Sumber : Data Desa Halong, 2024)

Dari data diatas, terlihat jumlah kemiskinan lebih besar dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga dapat diketahui masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan. Berdasarkan data jumlah kemiskinan dalam penerima BPNT, peneliti memilih Desa Halong sebagai lokasi penelitian karena desa halong angka kemiskinan cukup tinggi dan penerima manfaat cukup sedikit. Dilihat dari fenomena di atas, suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyaarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai.

Desa halong merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Pemerintah desa halong mulai melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2015. Keberhasilan program lebih efektif harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan program Bantuan Non Tunai (BPNT) khususnya di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Angka kemiskinan di pada kabupaten tabalong pada tahun 2021 sebanyak 3.498 jiwa, sedangkan di tahun 2022 turun menjadi 2.055 jiwa, atau mengalami penurunan sebesar 41%. (pemerintah kabupaten tabalong, 2023).

Berdasarkan pengamatan sementara, upaya pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Halong masih belum optimal. Pengimplementasian Bantuan Pangan Non Tunai tak selalu berpacu terhadap prosedur, sebab masih banyak di temui penyelewengan terhadap pendistribusian, kerap terjadi penguluran bantuan yang kurang tepat sasaran, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus menerima bantuan tersebut justru tak menerima sedikitpun bantuan tersebut. Hal ini menjadi sebuah topik di kalangan publik, sebab ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat serta kurang tepatnya waktu pendistribusian yang harusnya di berikan setiap bulan sekali namun bisa melebihi batas waktu.

Menurut Rupiarsieh,& Musta'ana (2023), dalam melalui Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) adalah salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat serta membantu masyarakat yang tergolong dalam perekonomian yang lemah, akan tetapi selama berjalannya BPNT dilingkungan masyarakat, penyaluran bantuan ini masih dikatakan kurang efisien, di karenakan belum tepat sasaran, di karenakan beberapa dari penerima BPNT sudah tidak termasuk dalam penerimaan indikator bantuan, disebabkan terjadinya pergantian data yang bergantung pada data daerah sehingga menghambat proses dari data pusat, dikarenakan adanya bahan pokok yang tidak tepat kualitas sehingga diperlukan pengevaluasian, sehingga menjadi tolak ukur dari pencapaian keberhasilan jalannya suatu program yang dilaksanakan.

Penelitian oleh (Dwita Agustina, 2022) yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto” dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada indikator evaluasi antara lain input, proses, outputs, outcome masih ditemukan kekurangan terkait pelaksanaan program BPNT tersebut karena ketidaksiapan Dinas Sosial selaku pelaksana kebijakan di daerah yang seharusnya bertanggung jawab melakukan penyaluran bantuan secara optimal di wilayah tersebut.

Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ada, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara kebijakan top-down, yaitu kebijakan yang di buat oleh pusat dan dilaksanakan oleh daerah (Mulyadi, 2016). Pelaksanaan bantuan sosial BPNT di desa Halong dalam wujud pemberian kartu elektronik dari kementerian sosial pada kenyataannya muncul beberapa kendala. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan. Terdapat dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan, dimana pada saat kebijakan itu dibuat pemerintah telah menentukan dan memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Lebih dari itu akan terdapat dampak – dampak yang terduga pada akhir implementasi kebijakan, yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan (Wibawa, 1994).

Kriteria Penerima Bantuan Dana Non Tunai (BPNT) di ambil sesuai dengan kriteria orang miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu seperti

:

- a. Luas Lantai Bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- b. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplaster.
- c. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama – sama dengan rumah tangga lain.
- d. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murah.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindungi / sungai / air hujan
- f. Bahan memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
- g. Hanya mengonsumsi daging / susu / ayam hanya 1 kali seminggu.
- h. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- i. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
- j. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas / poliklinik. 127
- k. Sumber kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaanlainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD.

- m. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Indikator Evaluasi menurut Dunn ada 6 yaitu pertama Efektifitas, yaitu tercapainya tujuan yang maksimal dan sesuai dengan yang ingin di capai dan diharapkan, namun pada kenyataannya masih banyak penerima BPNT yang tidak sesuai berdasarkan 14 kriteria diatas yang mendapatkan BPNT tersebut artinya efektifitas menurut Dunn ini tidak tercapai sesuai dengan apa yang di maksud dengan efektifitas tersebut. Indikator kedua Efisiensi, yaitu hemat biaya, waktu dan tenaga serta hasil yang maksimal tanpa mengeluarkan banyak, jadi berdasarkan kriteria Dunn yang ke Dua maka efisien disini belum terpenuhi karena banyaknya biaya pemerintah yang terbuang akibat tidak tepatnya penerima BPNT tersebut dan tenaga juga sia-sia oleh perangkat desa sebab perangkat desa selalu memberikan data penerima BPNT yang baru kepada pemerintah terkait namu selalu gagal sebab yang menerima BPNT tersebut masih belum juga berubah. Indikator ke Tiga Kecukupan, yaitu dapat memenuhi kebutuhan penerima kebijakan publik, jadi pada kenyataannya penyaluran BPNT ini tidak dapat memenuhi kebutuhan msyarakat miskin akibat tidak sesuai nya penerima BPNT ini. Indikator ke Empat Pemerataan yaitu mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh sasaran kebijakan publik, dan kenyataannya pemerataan ini tidak berlaku akibat tidak sesuainya penerima BPNT tersebut berdasarkan 14 kriteria diatas. Selanjutnya indikator ke Lima Responsivitas, yaitu respon dari pelaksana mengenai suatu kebijakan

publik, jadi tanggapan perangkat desa terkait tidak sesuai nya penerima BPNT tersebut yaitu dengan berusaha merubah data yang lama dengan mengganti dengan yang lebih membutuhkan namun yang keluar setiap tahunnya masih nama-nama yang lama (tidak sesuai nya penerima BPNT) tersebut. Indikator ke Enam Ketepatan, yaitu keberhasilan kebijakan publik dan benar-benar bernilai guna bagi kelompok sasaran, namun kenyataan nya ketepatan ini tidak berguna akibat tidak tepatnya penerima penyaluran BPNT tersebut karena tidak sesuai dengan 14 kriteria di atas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terkait permasalahan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai maka penulis tertarik untuk melakukann pemelilhan topik ini yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong”.

B. Fokus Penelitian

Focus penelitian dapat diartikan sebagai domain tunggal atau beberapa domain yang terkait sengan situasi sosial. Moleong (2010) menyatakan bahwa focus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membaatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan baik. Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan Batasan masalah yang di sebut dengan focus penelitian. Focus penelitian mengungkapkan data yang akan dikumpulkan berdasarkan kerangka konsep yang dibuat.

C. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengalisis Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan Masyara di Desa Halong. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi begi penelitian selanjutnya dalam bidang ini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi pemerintah daerah kabupaten Tabalong khususnya desa Halong yang

ada di kecamatan Haruai dalam merumuskan kebijakan dalam sebuah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan mengenai sebuah kebijakan terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penanggulangan Keniskinan di Desa Halong. Dengan demikian, di harapkan program tersebut dapat mencapai sasaran yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi juga untuk mengasah keterampilan komunikasi peneliti dalam menyajikan dan menjelaskan temuan penelitian kepada berbagai pemangku kepentingan, baik secara lisan maupun tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait Pengaruh program bantuan pangan non tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut;

1. Penelitian yang di lakukan Wiwit, W., & Kamil, M. (2020) dengan Judul “ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu” Hasil penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam monitoring dan evaluasi program BPNT yaitu pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua yaitu waktu.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Siregar, L. K., Pattimukay, H. V. R., & Waisapy, J. (2023) dengan Judul “ Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon” hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di negeri tawiri kecamatan teluk ambon

kota ambon berjalan cukup baik meskipun banyak hambatan yang ditemui. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dimana empat diantaranya belum terlaksana secara optimal. Sehingga untuk saran yang di ajukan yaitu perlu diadakannya pengajuan data terbaru atau aparat pemerintah harus melakukan pembaharuan terkait Bantuan Pangan Non Tunai untuk masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan serta berkonsultasi langsung dengan pendamping desa, Pemerintah selaku penyelenggara wajib memberikan sosialisasi kepada keluarga Penerima Manfaat tentang program bantuan Pangan Non tunai, pemerintah juga perlu melakukan perbaikan data administrasi KPM.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Asrin, A., Achmad, F. Y. N., & Sadat, A. (2022). dengan Judul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Baadia Kota Baubau” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas apabila hasil yang diinginkan telah mencapai tujuan yang dilihat dari ketepatan, kecukupan dan kualitas; cukup baik dalam meringankan beban pengeluaran serta dari segi kualitas sangat baik dengan KPM yang menyatakan kepuasan terhadap kualitas beras yang mereka dapatkan. Namun, dari keseluruhan dapat disimpulkan belum cukup efektif hal ini dapat dilihat dari penambahan masyarakat miskin. Efisiensi penelitian ini dilihat dari jumlah usaha dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui tingkat pemerataan, waktu dan responsivitas. masih banyak terdapat keluarga penerima manfaat

yang belum menangkap maksud tujuan dari program BPNT membuktikan bahwa kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan ketepatan waktu dimana masyarakat kurang kejelasan dalam waktu penerimaan bantuan yang berarti belum efektif. ada baiknya pemerintah selalu melaksanakan dengan rutin survei lapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak dan tidak sebagai penerima manfaat.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Sihombing, F. (2022) dengan Judul ” Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi ” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut sangat di sambut baik oleh masyarakat karena masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan mereka masing-masing sehingga tujuan dari program tersebut dapat berjalan yakni untuk mensejahterakan masyarakat miskin.
5. Penelitian yang di lakukan oleh Irawan, D. (2021) dengan Judul “ Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabubaten Kuantan Singingi “ Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan tentang indikator Efektifitas penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah baik . Untuk tindakan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat membantu Kebutuhan Pangan bagi masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai didesa pulau aro sudah baik didalam pelaksanaannya. Dan selanjutnya untuk penyaluran pemberian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah baik dalam

memeberikan Program BPNT disetiap bulannya. Jadi dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Pulau Aro sudah baik sebab Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah tercapai dalam Tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam program BPNT ini. Untuk itu peneliti menilai bahwah Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pulau Aro Untuk Indikator Efektifitas sudah berjalan dengan baik di desa pulau aro.

B. Kerangka Teori

a. Definisi Adminitrasi

Istilah administrasi diambil dari kata “*ad*” dan “*ministro*”. *Ad* mempunyai arti “kepada” dan *ministro* berarti “melayani” sehingga administrasi diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Selain itu, kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu *administrate* yang artinya kegiatan penyusunan dan pencatatan. Kegiatan ini mencakup kegiatan tulis-menulis, mengirim dan menyimpan keterangan, dan dikaitkan pula dengan aktivitas administrasi perkantoran yang hanya merupakan salah satu bidang dari aktivitas administrasi yang sebenarnya (Prof. Dr. H. Kartiwa A. (2015).

Ngalim Purwanto berpendapat bahwa kata *ad* dalam administrasi mempunyai arti yang sama dengan kata *to* dalam bahasa Inggris yang berarti “ke” atau “kepada”. Kata *ministrare* sama artinya dengan kata *to serve* atau *to conduct* yang berarti “melayani”,

“membantu”, atau “mengarahkan”. Dalam bahasa Inggris, *to administer* berarti pula mengatur, memelihara (*to look after*), dan mengarahkan. Administrasi merupakan kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi sebagai suatu proses organisasi dan individu yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu institusi atau lembaga tertentu (Prof. Dr. H. Kartiwa A. (2015)).

b. Metode Penelitian Administrasi

Metode penelitian administrasi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (personel ataupun materiel) secara efektif, efisien, dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan.

Fungsi dari penelitian adalah untuk meramalkan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati untuk mendapatkan kebenaran.

Crawford mengajukan sembilan kriteria atau ciri-ciri penelitian, yaitu:

a. berkisar pada masalah yang ingin dipecahkan,

- b. mengandung unsur-unsur orsinalitas,
- c. berdasarkan pandangan ingin tahu,
- d. dilakukan dengan pandangan terbuka,
- e. berdasarkan asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan,
- f. berkehendak untuk menemukan generalisasi atau dalil,
- g. studi tentang sebab akibat,
- h. menggunakan pengukuran yang akurat,
- i. menggunakan teknik yang secara sadar diketahui.

(Prof. Dr. H. Kartiwa A. (2015).

1. Evaluasi

a. Definisi Evaluasi

(Nurcholis *et al.*, 2017, hal. 7.21-7.23) dalam tahapan pembuatan kebijakan, evaluasi kebijakan adalah tahap yang terakhir dilakukan dan merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, *outputs*, hingga *outcomes* dari peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Dari tahap evaluasi inilah dapat menarik kesimpulan sudahkah kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana awal. Dan dari tahap evaluasi pulalah dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai sudah sejauh mana dan jika gagal maka dapat mengidentifikasi mengapa kebijakan tersebut bisa gagal. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dan tanggungjawab para pelaksana kebijakan sudah sampai sejauh

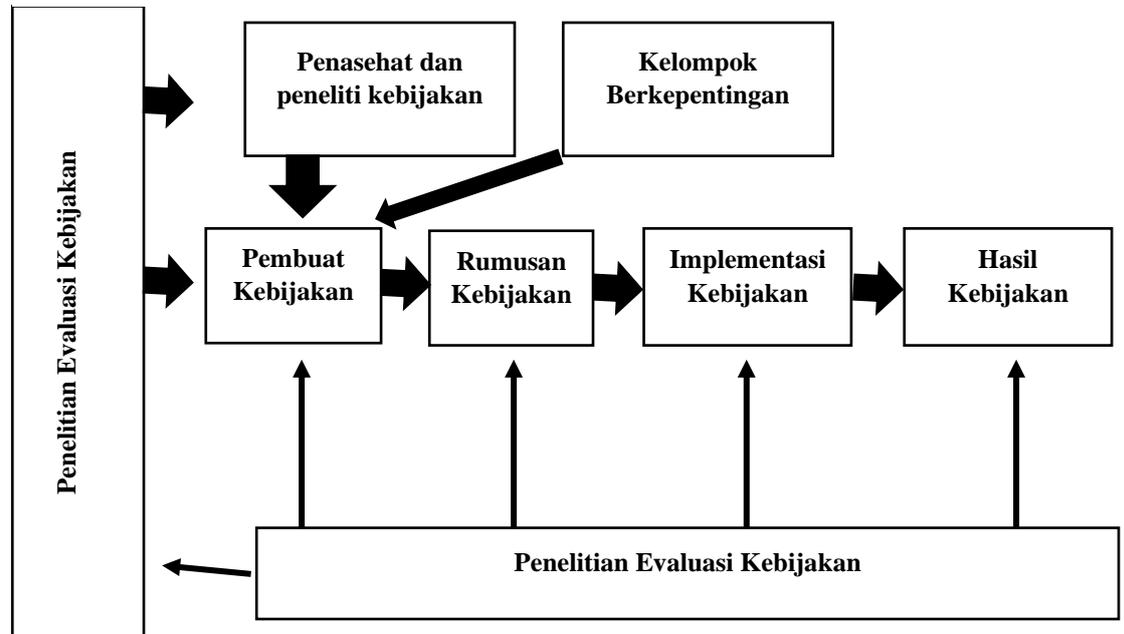
mana. Selain itu, tahap penilaian ini juga dipakai sebagai tolak ukur bagi para pembuat peraturan guna penyempurnaan lebih lanjut.

b. Evaluasi kebijakan

Rue dan Byars (2000) menyatakan bahwa *policy* adalah : *general guide to action that direct the attainment of objectives. Policy does not tell organizational members exactly what to do, but they do establish the boundaries within which they must operate*". kebijakan adalah merupakan arahan untuk bertindak dalam rangka pencapaian tujuan. *Policy* tidak ditunjukkan secara pasti anggota organisasi untuk bertindak, tetapi hanya memberikan batas – batas (ruang lingkup) untuk bertindak.

Menurut Mustapadjaja (2000) menyatakan bahwa Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah tertentu, melakukan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara.

Gambar 2. 1 Posisi Penelitian Evaluasi Dalam Proses Kebijakan Publik



(sumber: prof. Dr. Sugiyono, 2018).

c. Tipe-tipe Evaluasi Terdapat empat tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Finance, diantaranya adalah:

- 1) Evaluasi kecocokan (*appropriateness*), yaitu melaksanakan evaluasi apakah suatu kebijakan tetap bisa dipertahankan atau kebijakan tersebut perlu diganti dengan kebijakan yang baru;
- 2) Evaluasi efektivitas, yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan tentang apakah kebijakan tersebut sudah menghasilkan hasil atau dampak sesuai dengan tujuan kebijakan;

- 3) Evaluasi efisiensi, yaitu melaksanakan penilaian dengan pedoman ekonomis, yaitu sejauh mana manfaat yang diterima dibandingkan dengan sumber daya yang telah dikeluarkan; 16
- 4) Evaluasi meta, yaitu melaksanakan penilaian terhadap tahapan penilaian itu sendiri.

Disiplin dan tahapan waktu adalah pedoman dasar dalam tahapan evaluasi. Makanya kita perlu (1) membuat aturan umum untuk melakukan penilaian, dan (2) membuat pengaturan fasilitas yang terdiri dari parameter dan indikator. Aturan umum terdiri dari empat aspek yang terdiri dari:

- 1) Input, merupakan bentuk saran yang diberikan kepada pelaksana kebijakan;
- 2) Proses, yaitu cara mentransformasikan suatu peraturan kedalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat;
- 3) *Outputs* (hasil), merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan;
- 4) *Outcomes* (dampak), merupakan dampak yang dihasilkan kepada target sasaran apakah sesuai dengan rencana kebijakan.

Sedangkan seperangkat instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) Input, indikator-indikatornya terdiri dari:
 - a. Sumber daya pendukung seperti Sumber Daya Manusia, biaya, sarana ataupun prasarana);

b. Bahan pendukung lainnya yang berupa peralatan dan teknologi.

2) Proses, indikator-indikatornya terdiri dari:

a. Apakah kebijakan telah dilaksanakan secara tepat sasaran atau tidak;

b. Tepat guna ataupun tidak;

c. Efisien atau tidakkah kebijakan tersebut;

3) *Outputs* (hasil), indikator-indikatornya terdiri dari:

a. Ketepatan sasaran;

b. Besar sasaran yang diakomodir;

c. Banyaknya target yang ditangani;

d. Jumlah kelompok sasaran yang terlibat;

4) *Outcomes* (dampak), indikator-indikatornya terdiri dari:

a. Ada atau tidaknya perubahan pada target kebijakan;

b. Seberapa besar perubahan target yang telah menerima;

c. Seberapa jauh perubahan yang terjadi pada target kebijakan dibandingkan dengan tujuan yang hendak diraih.

2. Indikator Evaluasi

William Dunn mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut (F. Sihombing, 2022) :

a. Efektivitas dari kata dasar efektif yang memiliki arti pencapaian akan sebuah keberhasilan guna mencapai keinginan yang telah

ditentukan. Efektivitas mengandung hubungan saling terkait dengan hasil yang sungguh-sungguh ingin diraih.

- b. Efisiensi mengandung arti jumlah usaha yang dibutuhkan dalam mencapai tingkatan tentang seberapa efektif. Efisiensi juga memiliki persamaan arti dengan rasionalitas ekonomi, dua kata tersebut saling keterkaitan antara efektivitas dan hal yang sungguh-sungguh dilakukan dan biasanya tolak ukur dari sebuah efisiensi adalah ongkos atau tariff biaya yang perlu dikeluarkan. Suatu kebijakan dikatakan memenuhi efektivitas yang tinggi apabila dalam hal biaya menggunakan biaya terendah maka dapat dikatakan telah efisien.
- c. Kecukupan adalah dengan terpenuhinya suatu kebutuhan yang bisa memberi rasa puas tentang segala sesuatu yang diinginkan. Ketepatan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengetahui suatu tindakan yang berasal dari sebuah kebijaksanaan dalam memenuhi tujuan atau kelebihan dari suatu kegunaan kepada target.
- d. Perataan disini mengandung arti sebuah kegunaan dan tarif ongkos yang dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan program, dan apakah suatu hal yang termuat dalam program telah dibagikan sesuai dengan porsi yang sama untuk kalangan-kalangan yang terlibat di dalamnya.
- e. Responsivitas adalah suatu tindakan dari dalam pikiran kita untuk memahami dan mengerti tindakan dari pemerintah guna

melaksanakan sebuah pelayanan. Tingkat kepekaan dapat dilihat dari pencapaian hasil oleh pemerintah untuk menjalin sebuah hubungan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Responsivitas juga memberikan pengertian hasil dari keputusan pemerintah apakah telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

- f. Ketepatan mengandung arti seseorang yang dapat memberikan sebuah petunjuk untuk melakukan sebuah tindakan pada program terkait sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan, atau ketepatan juga dapat dikatakan bahwa dari sebuah program yang terlaksana dari sebuah keputusan pemerintah apakah hasil yang tercapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

3. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Menurut Arikanto (2002:13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing – masing komponen. Tujuan dan fungsi menurut Crawford (2000:30) adalah ;

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan – tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- b. Untuk memberikan objektifitas pengamatan terhadap perilaku hasil
- c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan
- d. Untuk memberikan umpan bagi kegiatan yang dilakukan

4. Kemiskinan

a. Definisi kemiskinan

Megawati Simanjuntak, (2013). Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga.

Adawiyah, (2021) kemiskinan adalah ketika seseorang atau rumah tangga menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan lingkungan penduduknya kurang membantu untuk memberikan kesejahteraan jangka panjang dan kerentanan pendapat.

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan mendefinisikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat di sederhanakan. pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengetasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang yang masuk kedalam kategori miskin menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri dimasing – masing komunitas dan

daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai – nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakat.

b. Faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di antaranya; Nunung Nurmawati (2008: 1-11), dalam Kartasasmita, Ginandjar (1996: 240)

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan
- 2) Rendahnya derajat kesehatan
- 3) Terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.

5. Konsep BPNT

a. Pengertian BPNT

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan setiap bulan berupa sembako dan diberikan melalui rekening elektronik yang dipertukarkan melalui e-warung yang ditunjuk dari desa masing – masing. (Lilik Rodhiatun Nadhifah & Nur Huri Mustofa 2021)

Menurut Helvine Gultom (2020) BPNT adalah konversi dari beras sejahtra atau Rastra yang kemudian akan disalurkan kepada KPM. BPNT adalah upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program. Pada akhirnya, penyaluran BPNT diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Program BPNT dilaksanakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Menteri Sosial telah menetapkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah sangat mendukung program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

b. Manfaat program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut PERMENSOS nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran BPNT pasal 2 ayat 2 manfaat BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus sebagai upaya perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan
- 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
- 3) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai(GNNT)
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

c. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan program Sembako adalah sebagai berikut (PERMENSOS, 2019) :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

d. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran BPNT

Ada beberapa mekanisme pelaksanaan dan penyaluran BPNT;

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu, wilayah dan tahapan pelaksanaan serta Bank Penyalur BPNT. Kegiatan ini meliputi

Koordinasi Pelaksanaan, Penyiapan Data KPM, Pembukaan Rekening Kolektif dan Persiapan e-Warong.

Tahap pertama yang harus dilalui adalah koordinasi pelaksanaan dimana koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Tahap kedua yaitu penyiapan data KPM yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Tahap ketiga yaitu pembukaan rekening kolektif oleh Bank Penyalur untuk Bantuan Pangan dan pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Dan tahap keempat yaitu persiapan e-warong, setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing gampong dari kementerian sosial, Bank Penyalur bersama pemerintah 37 kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

Kemudian mekanisme penyaluran bantuan terdiri dari;

1. Proses penyaluran dana BPNT dilaksanakan oleh bank Penyalur, tanpa pengenaan biaya;
2. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening kementerian sosial di Bank Penyalur ke rekening wallet KPM BPNT;

3. Pemindah bukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari kas Negara ke rekening kementerian sosial di Bank Penyalur;
 4. Penyaluran dana BPNT ke dalam rekening wallet KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dan;
 5. Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- e. Syarat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Syarat penerima Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana di sebutkan dalam PERMENSOS (2019) dalam pasal 5 di sebutkan,

- 1) Peserta BPNT di persyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
 - 2) KPM BPNT sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di utamakan untuk peserta keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
6. Faktor yang Membuat Implementasi Kebijakan Gagal

Walaupun suatu kebijakan telah dibuat dengan sangat baik, namun hal ini tidak dapat meluputkan proses pelaksanaannya berjalan tanpa

adanya kegagalan. Maka dari itu berikut ini faktor kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan (Nurcholis *et al.*, 2017, hal. 7.15-7.16):

- a. Kebijakan yang dibuat penjelasannya tidak rinci. Yang berarti jika pembuatan peraturan tidak dijelaskan secara detail sehingga pelaksana peraturan tidak mengerti dan menyimpulkan pemikirannya sendiri;
 - b. Lembaga atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik tidak tepat;
 - c. Adanya tujuan yang tidak searah;
 - d. Upah tambahan yang tidak menarik, artinya pelaksana peraturan beranggapan jika upah tambahan guna pelaksanaan peraturan tidak sesuai dengan usahanya;
 - e. Keterbatasan kemampuan;
 - f. Sumber daya administrasi yang terbatas; dan
 - g. Kegagalan dalam menjalin komunikasi.
7. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Terdapat tiga faktor yang dapat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2014, hal. 257) diantaranya adalah:

- a. karakteristik dari masalah,
- b. karakteristik kebijakan/undang-undang,
- c. lingkungan.

8. Regulasi BPNT

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang BPNT adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

a. Pasal (1) Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- 2) Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
- 3) Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
- 4) Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
- 5) Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan

disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.

- 6) Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
- 7) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- 8) Wilayah Khusus adalah wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan, sinyal, dan infrastruktur nontunai.
- 9) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BPNT bertujuan untuk:

- 1) mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- 2) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;

- 3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- 4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2. Kriteria dan Persyaratan

Pasal 3 BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:

- 1) tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
- 2) terdapat e-warong.

Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- 2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

3. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran BPNT

Ada beberapa mekanisme pelaksanaan dan penyaluran BPNT;

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu, wilayah dan tahapan pelaksanaan serta Bank Penyalur BPNT. Kegiatan ini meliputi Koordinasi Pelaksanaan, Penyiapan Data KPM, Pembukaan Rekening Kolektif dan Persiapan e-Warong.

Tahap pertama yang harus dilalui adalah koordinasi pelaksanaan dimana koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Tahap kedua yaitu penyiapan data KPM yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Tahap ketiga yaitu pembukaan rekening kolektif oleh Bank Penyalur untuk Bantuan Pangan dan pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Dan tahap keempat yaitu persiapan e-warong, setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing gampong dari kementerian sosial, Bank Penyalur bersama pemerintah 37 kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

Kemudian mekanisme penyaluran bantuan terdiri dari;

1. Proses penyaluran dana BPNT dilaksanakan oleh bank Penyalur, tanpa pengenaan biaya;

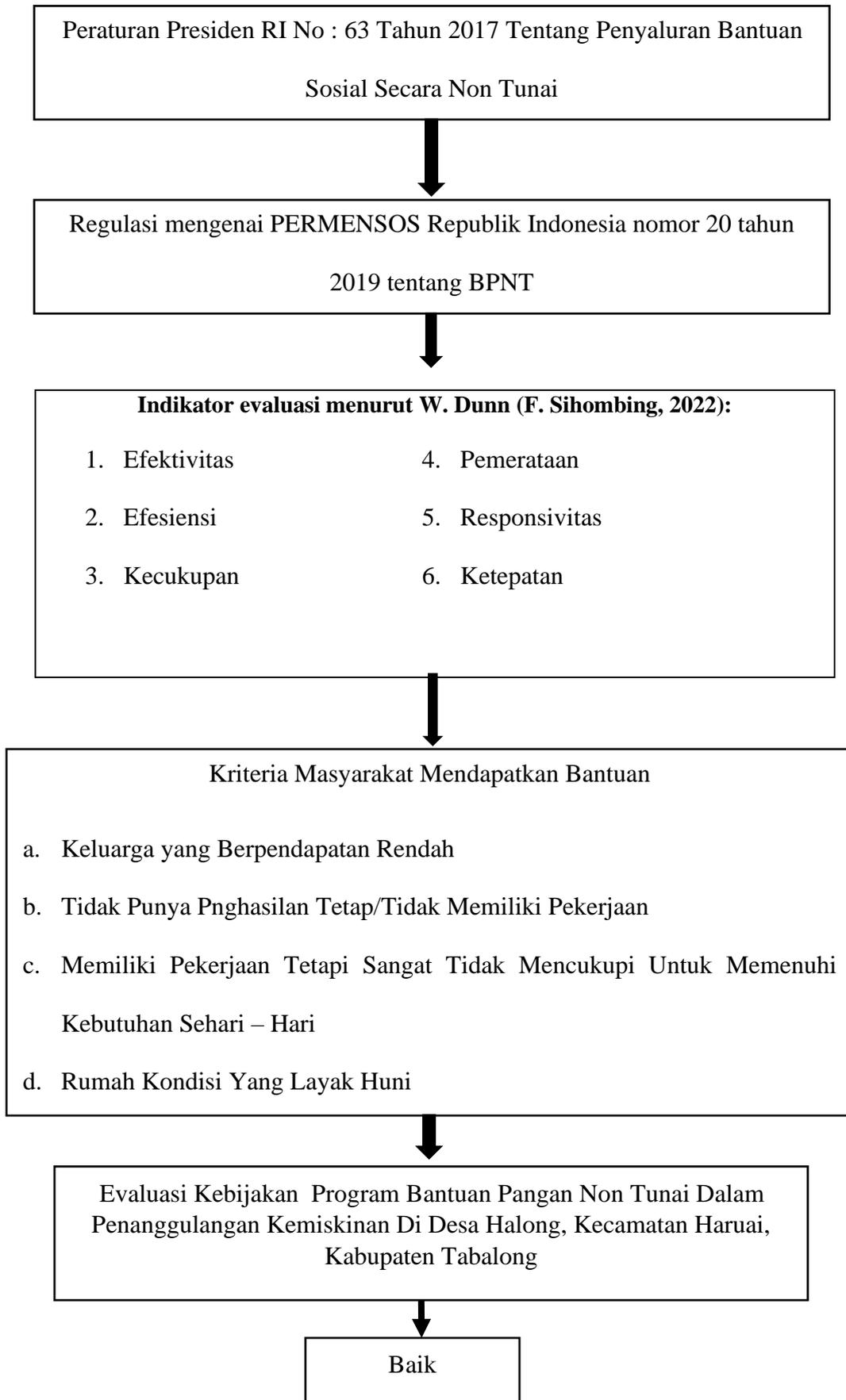
2. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening kementerian sosial di Bank Penyalur ke rekening wallet KPM BPNT;
 3. Pemindah bukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari kas Negara ke rekening kementerian sosial di Bank Penyalur;
 4. Penyaluran dana BPNT ke dalam rekening wallet KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dan;
 5. Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. Pemantauan dan Evaluasi
- Pada pasal 60 dijelaskan bahwa:
- 1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
 - 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat dan tim pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai.
- 5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori pendukung dalam yang terkait dengan penelitian ini dan berfungsi untuk menjelaskan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong” yang akan dikaji dalam ruanglingkup Administrasi Publik.

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



(Sumber : Penulis, 2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang di desain secara umum yaitu penelitian yang dilakukan untuk objek kajian yang tidak terbatas dan menggunakan metode ilmiah menjadi patokan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Halong Kecamatan Haruai. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan suatu objek tertentu, dimana setelahnya hasil penelitian akan dipaparkan dalam sebuah laporan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah untuk menggambarkan bagaimana kondisi dari fokus penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum mengenai fenomena sosial yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh. Maka dalam penelitian ini peneliti berusaha memperoleh gambaran yang konkret mengenai fenomena yang terjadi terkait Evaluasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa Halong Kecamatan Haruai.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Waktu penelitian ini akan dimulai sejak proposal penelitian ini sudah di sidangkan dan memperoleh rekomendasi untuk memulai melakukan. Jika diperkirakan waktu penelitian ini membutuhkan waktu minimal empat bulan dan maksimal enam bulan hal ini didasarkan pada proses penelitian dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama melakukan penelitian.

C. Sampel Sumber Data

Sampel adalah komponen objek penelitian yang mencerminkan populasi. Penelitian ini metode pengambilan sampel dikenal sebagai teknik purposive sampling. Karena pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian maka ukuran sampel tidak menjadi perhatian. Dengan kata lain, jumlah sampel yang dihubungi telah dirancang sesuai dengan standar tertentu yang di tetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut sampel yang dikumpulkan oleh peneliti:

1. Pendamping BPNT : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. penerima manfaat BPNT : 5 orang

Jumlah :7 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiarto (2015), teknik pengumpulan Terdapat tiga metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang berbeda untuk penelitian ini, yaitu:

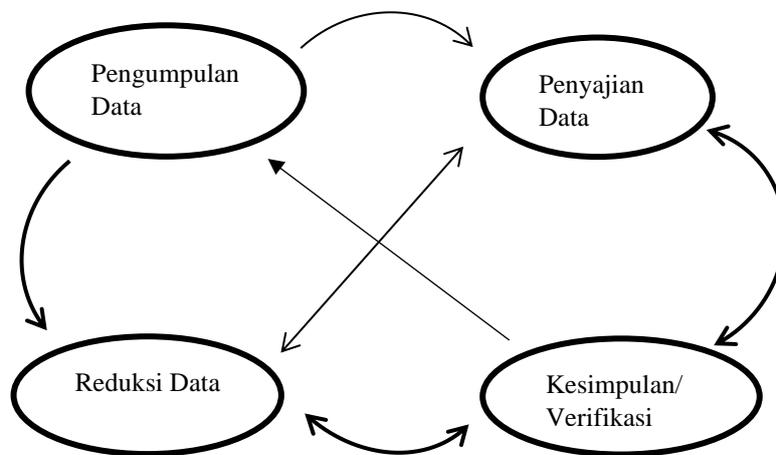
1. Observasi Dalam observasi ini peneliti menggunakan alat untuk mengumpulkan data yaitu buku, pulpen, dan handphone, dimana alat-alat tersebut peneliti gunakan untuk mencatat semua peristiwa yang peneliti amati;
2. Wawancara Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur atau wawancara dimana pertanyaan telah ditentukan sebelumnya atau disusun dan membawa alat yang berfungsi sebagai instruksi wawancara;
3. Dokumentasi Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memenuhi data atau informasi yang dibutuhkan untuk variabel penelitian yang telah direncanakan sebelumnya.

E. Teknik analisis Data

Teknik analisis data Peneliti menggunakan pendapat Miles dan huberman dalam Sugiyono (2015) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga data sudah jenuh.

Menurut Sugiyono (2010), teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman, adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data Kualitatif



Sumber : Miles, M.B., Huberman,. A.M., & Saldana. J (2014 : 10)

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua data yang di butuhkan secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Penelitian ini dalam mengumpulkan data didapat dari hasil wawancara, hasil observasi dengan Masyarakat.

2. Reduksi data adalah proses merangkum informasi, memilih yang paling signifikan, berkorentansi, mencari tema dan pola, dan menghilangkan

detail yang tidak relevan. dengan demikian, data yang direduksikan akan menyajikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan pengumpulan data lebih lanjut oleh peneliti;

3. Penyajian data adalah menunjukan data setelah di reduksi. Dalam penelitian kualitatif digunakan ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, dan lainnya. Menurut Miles dan Huberman dalam hal ini, teks yang bersifat naratif adalah yang paling sering digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif;
4. Penarikan kesimpulan menurut miles dan huberman adalah fase terakhir dalam teknik analisis data kualitatif. Jika bukti yang akurat dan andal digunakan untuk mendukung kesimpulan peneliti, kesimpulan tersebut dianggap kredibel.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan April hingga bulan Juli tahun 2024. Adapun tahapan - tahapan yang dimulai dari pengajuan proposal pada bulan April tahun 2024, seminar proposal pada bulan mei tahun 2024, penelitian lapangan dimulai dari awal juni sampai akhir bulan juni tahun 2024, dan sidang skripsi di bulan Juli tahun 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Letak Geografis

Untuk melakukan penelitian, penulis mengambil lokasi di Desa Halong Kecamatan Haruai, yang memiliki luas 2584 ha/m^2 , dengan penetapan batas dan peta wilayah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1965.

Secara administrasi Desa Halong berbatasan wilayah dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Catur Karya
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa suput
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nawin
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan desa Hayup

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Halong



Sumber : Map Data 2024.

Desa Halong Mempunyai Luas wilayah menurut pengguna berupa luas pemukiman 56 ha/m^2 , luas persawahan 136 ha/m^2 , luas pekebunan 275 ha/m^2 .

2. Keadaan Demografis

Desa halong merupakan desa yang sangat dekat dengan kantor kecamatan Haruai sehingga persebaran penduduk lebih banyak dari desa lain nya yang ada di kecamatan Haruai

Tabel 4. 1 Persebaran Penduduk

Jumlah Laki – Laki	860 jiwa
Jumlah Perempuan	854 jiwa
Jumlah Total	1,714 jiwa
Jumlah kepala keluarga	1,165 jiwa

Sumber : Data Desa Halong

a. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Halong

Desa halong merupakan desa dari 13 desa yang ada di kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang ada di desa Halong adalah bertani seperti menanam padi dan menyadap karet.

3. Visi Misi Kantor Desa halong

Visi kantor desa halong adalah mewujudkan desa Halong yang agamis, cerdas, sejahtera dan mandiri.

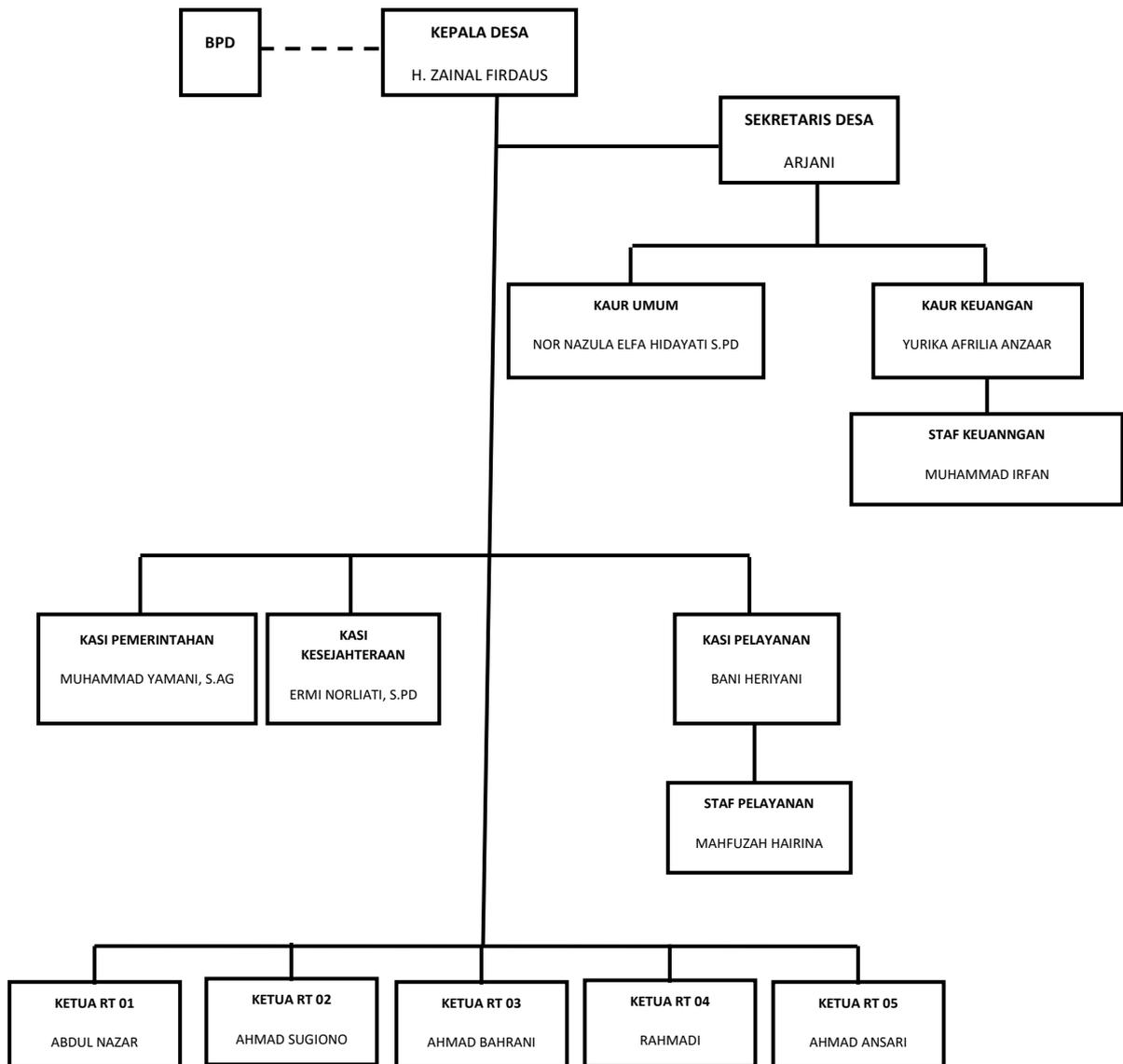
Misi kantor desa Halong yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintah desa Halong yang amanah, adil dan disiplin.
- b. Menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat di desa Halong.
- c. Meningkatkan pelayanan public di desa Halong.

- d. Perlindungan sosial.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa (Bumdes).
- f. Transparan dalam menjalankan pemerintahan desa.
- g. Meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- h. Meningkatkan kualitas pendidikan tpa di desa Halong.
- i. Meningkatkan keterampilan petani desa berbasis inovasi desa maupun Pelatihan.
- j. Pengelolaan asset desa Halong. Meningkatkan sarana prasarana ekonomi, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di desa Halong.

4. Struktur organisasi pemerintah Desa Halong

Gambar 4. 2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Halong
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA HALONG



SUMBER : profil Desa Halong 2024

5. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Halong

a. Tugas dan fungsi Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemsyarakatakan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi Kepala Desa

Kepala desa melaksanakan tugas sebagai mana ayat (2) di atas, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya penertiban masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang Pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosisal budaya masyarakat, keagamaan dan ketanakerjaan.

- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

c. Tugas dan fungsi Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan keketataris desa.
- 2) Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang adminitrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(2) sekretaris desa memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut;

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

- 1) Kepala urusan umum dan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat.
- 2) Kepala urusan umum dan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2) Kepala urusan umum dan perancanaan mempunyai fungsi;

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas,
- 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat.
- 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa,
- 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa.
- 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor.
- 6) Penyiapan rapat-rapat.
- 7) Pengadministrasian aset desa.
- 8) Pengadministrasian inventarisasi desa.
- 9) Pengadministrasian perjalanan dinas.
- 10) Melaksanakan pelayanan umum.
- 11) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa,

- 12) Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa),
 - 13) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa
- e. Tugas dan fungsi urusan keuangan
- 1) Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi desa.
 - b. Persiapan bahan penyusunan APB desa.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
- f. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan
- 1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b) Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
 - d) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa

- f) Melaksanakan penataan dan pengelolaan Profil Desa
- g) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang social budaya
 - b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi
 - c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik
 - d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
 - e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga
 - f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda olahraga dan karang taruna
 - g) Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- h. Kepala seksi pelayanan

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa
- 3) Melaksanakan pelestarian nilai social budaya masyarakat desa

- 4) Melaksanakan pelestarian nilai budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa
- 5) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
- 6) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
- 7) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
- 8) Melaksanakan pembangunan Pendidikan
- 9) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan

B. Temuan Penelitian

Peneliti menguraikan serta menerangkan data dari hasil wawancara serta langsung dengan subjek penelitian. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara terstruktur yaitu peneliti memberikan pernyataan sudah disiapkan untuk dijawab subjek penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan 7 Masyarakat diantaranya yaitu 1 orang pendamping BPNT, 1 orang Sekretaris Desa, dan 5 orang masyarakat penerima manfaat, di Desa Halong Kecamatan Haruai, Kabupaten tabalong.

Hasil penelitian tentang Evaluasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

1. Efektivitas program

- a) Apakah Bantuan yang diberikan melalui program BPNT dapat Membantu kebutuhan.

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

”iya, sebagian besar penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka, namun ada juga yang merasa bantuan ini masih belum cukup untuk kebutuhan terutama bagi keluarganya banyak” (hasil wawancara 26 juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberi pernyataan sebagai berikut:

“kami melihat bahwa program BPNT ini cukup efektif dalam membantu warga yang kurang mampu. meski begitu, ada beberapa warga yang merasa jumlah bantuannya masih kurang, dan ada juga yang mengeluhkan keterlambatan distribusi.” (hasil wawancara 26 juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, bantuan yang diberikan melalui program BPNT sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari terutama untuk bahan pangan.”(hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“saya merasa sangat terbantu dengan adanya program BPNT. Meskipun jumlahnya tidak banyak, setidaknya bisa meringankan beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“bantuan ini cukup bermanfaat, tetapi terkadang tidak mencukupi dalam kebutuhan pokok.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“saya merasa terbantu dengan program ini, namun distribusinya terkadang terlambat dari jadwal perbulannya.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“program ini sangat membantu, tetapi saya berharap ada peningkatan jumlah yang diberikan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program BPNT sangat membantupenerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, terutama kebutuhan pangan.

Pendamping BPNT menyatakan bahwa sebagian besar penerima merasa bantuan ini sangat membantu , meskipun ada yang merasa jumlah nya belum cukup, terutama bagi keluarga yang besar. Sekretaris Desa menambahkan bahwa program ini cukup efektif, meskipun ada keluhan mengenai jumlah bantuan yang kurang.

Pernyataan masyarkat juga menunjukkan bahwa bantuan ini bermanfaat dalam mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari – hari. Meskipun begitu, ada beberapa masyarakat yang merasa bantuan masuh kurang dan distribusinya terkadang terlambat.

- b) Bagaimana program BPNT mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“program BNPT memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penerima manfaat dan keluarga mereka. Banyak yang melaporkan peningkatan kualitas hidup karena kebutuhan pangan pokok mereka terpenuhi, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan anggaran kebutuhan lain seperti kebutuhan pendidikan.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kami melihat bahwa program ini berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Beban ekonomi keluarga lebih ringan, dan mereka fokus pada pendidikan anak – anak mereka.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“dengan adanya bantuan ini , kesejahteraan keluarga kami meningkat karena kebutuhan dapat di penuhi dengan baik, kami dapat mengalokasikan dana kebutuhan lain seperti pendidikan anak.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, kami merasa lebih sejahtera, karena program ini membantu mengurangi pengeluaran kami.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya bantuan ini membuat kami sejahtera, dari bantuan ini kami dapat mengalihkan ke kebutuhan lainnya.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya lumayan, kesejahteraan kami merasa meningkat.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, dengan adanya bantuan ni, kami merasa sejahtera .” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa program BPNT memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penerima manfaat.

Pendamping BPNT menyatakan bahwa program ini meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga memungkinkan alokasi anggaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan. Sekretaris desa juga mengamati bahwa program ini berperan besar dalam meringankan beban ekonomi keluarga, memungkinkan mereka lebih fokus pada pendidikan anak – anak mereka.

Pernyataan masyarakat mendukung pandangan ini, dengan banyak merasa kesejahteraan keluarga mereka meningkat karena kebutuhan dasar terpenuhi, yang memungkinkan pengalihan dana ke kebutuhan lain. Masyarakat secara umum melaporkan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan pengeluaran berkat bantuan ini.

- c) Berikut wawancara mengenai Tujuan program BPNT tercapai dalam membantu kebutuhan dasar.

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“secara umum, tujuan program ini tercapai dalam membantu kebutuhan dasar pangan penerima manfaat. Namun ada beberapa tantangan terkait jumlah dan kualitas bantuan yang masih perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan secara lebih optimal.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“program ini berhasil dalam menyediakan bantuan kepada warga, tetapi ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kecepatan distribusi, agar tujuan program dapat tercapai sepenuhnya.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, saya merasa program bantuan ini tercapai karena bantuan pangan yang diberikan cukup membantu. “ (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“secara umum ya, tujuan ini tercapai dalam membantu kebutuhan dasar kami, meskipun begitu, ada kalanya bantuan tidak mencukupi seluruh kebutuhan keluarga.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“tujuan program ini sebagian besar tercapai, bantuan ini sangat membantu.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“saya merasa tujuan program bantuan ini tercapai dalam hal memenuhi kebutuhan kami.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, saya rasa bantuan ini tujuan program ini tercapai.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Program BPNT umumnya tercapai dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar pangan penerima manfaat, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Pendamping BPNT menyatakan bahwa tujuan program ini tercapai dalam membantu kebutuhan dasar pangan, tetapi ada tantangan terkait jumlah dan kualitas bantuan yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan secara optimal. Sekretaris Desa menambahkan bahwa program ini berhasil dalam menyediakan bantuan kepada warga, tetapi aspek seperti kecepatan distribusi perlu ditingkatkan agar tujuan program dapat tercapai sepenuhnya.

Pernyataan masyarakat juga menunjukkan bahwa tujuan program ini umumnya tercapai. Masyarakat merasa bahwa bantuan yang diberikan cukup membantu dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun ada yang merasa bahwa bantuan kadang tidak mencukupi seluruh kebutuhan keluarga.

d) Kendala utama dalam menerima bantuan

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kendala utama yang sering dihadapi termasuk keterlambatan dalam distribusi bantuan dan ketidakstabilan kualitas barang yang diberikan. Selain itu, ada juga masalah terkait kurangnya koordinasi dalam pendataan penerima manfaat.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kendala utama adalah distribusi yang tidak selalu tepat waktu, yang dapat menyebabkan penerima manfaat mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan, selain itu ada juga tantangan dalam memastikan semua data penerima manfaat akurat dan terkini.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kendalaa utama yang kami dapat ya seperti terlambat distribusinya, tidak tepat waktu gitu.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kendala utama yang kami hadapi paling keterlambatan distribusi.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“masalah utamanya itu terkadang kurang cukup selama dua bulan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kendala utamanya itu dalam pendistribusian kadang kurang tepat waktu.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kendala utama yang kami hadapi yaitu kurangnya transparansi dalam jumlah, kadang kadang kami tidak sama dengan yang lain.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam program BPNT meliputi keterlambatan distribusi, kurang koordinasi dalam pendataan penerima manfaat, dan kurang transparansi serta konsisten jumlah bantuan.

Pendamping BNPT dan sekretaris Desa mengidentifikasi keterlambatan distribusi dan masalah kualitas sebagai isu utama, serta perlunya perbaikan dalam koordinasi dan akurasi data.

Masyarakat juga melaporkan masalah serupa, dengan fokus pada keterlambatan distribusi dan ketidakkonsistenan jumlah bantuan. Secara keseluruhan, mengatasi kendala ini memerlukan perbaikan dalam sistem distribusi, akurasi data, dan transparansi dalam jumlah bantuan untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat.

2. Efisiensi Program

a.) Proses penyaluran Bantuan yang cepat dan efisien

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“dalam proses bantuan penyaluran sering kali menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan efisiensi. Terdapat keterlambatan dalam distribusi yang dapat memengaruhi kelancaran proses dan pengalaman penerima. “(hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan Pernyataan sebagai berikut:

“secara umum, proses penyaluran bantuan belum sepenuhnya cepat dan efisien,. Keterlambatan dalam distribusi masih menjadi masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program.” (hasil wawancara 26 Juni 2024) .

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“proses penyaluran sering kali tidak cepat, kami terkadang harus menunggu lebih lama dari jadwal yang ditetapkan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“tidak selalu . proses distribusi bantuan sering lambat dan kurang efisien.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“penyaluran cukup cepat dan efisien , tetapi ada sedikit keterlambatan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya,, cukup cepat. Cukup efisien bagi saya.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya saya rasa cukup cepat bagi saya pribadi.” (*hasil wawancara 27 Juni 2024*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyaluran bantuan program BPNT kendala utamanya adalah keterlambatan distribusi. Pendamping BPNT dan sekretaris Desa mengidentifikasi masalah ini sebagai faktor yang mengurangi kecepatan dan efisiensi distrbusi. Masyarakat juga melaporkan seringnya keterlambatan dalam proses penyaluran, meskipun ada beberapa yang merasa prosesnya cukup cepat dan efisien.

b.) Biaya atau usaha tambahan ysng dikeluarkan untuk menerima bantuan Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“secara umum, penerima manfaat tidak mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan. Namun ada beberapa yang perlu mengeluarkan biaya sedikit untuk mengambil bantuan.” (*hasil wawancara 26 Juni 2024*)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“tidak ada biaya yang harus dikeluarkan penerima, tetapi hanya ada usaha untuk meluangkan waktu untuk melakukan pengambilan bantuan tersebut.” (*hasil wawancara 26 Juni 2024*).

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kami tidak mengeluarkan biaya, hanya sedikit meluangkan waktu untuk mengambil bantuan yang diberikan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, ada usaha untuk menerima bantuan itu, tetapi tidak ada biaya yang dikeluarkan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“untuk saya tidak ada sih.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“untuk saya tidak ada, tidak ada.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“tidak ada, cuman modal waktu saja untuk mengambil bantuan itu.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat program BPNT umumnya tidak mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa penerima hanya perlu meluangkan waktunya untuk mengambil bantuan, dengan tidak ada biaya langsung dikeluarkan.

c.) Menilai penggunaan sumber daya dalam program

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“penggunaan sumber daya dalam program ini cukup efektif, tetapi masih terdapat perbaikan dalam hal efisiensi distribusi dan alokasi sumberdaya agar bantuan lebih tepat sasaran.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dalam program ini memadai, meskipun ada beberapa tantangan dalam pengelolaan dan distribusi yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas program. “ (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“penggunaan sumber daya cukup baik menurut saya” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, sumber daya program ini dimanfaatkan dengan baik.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“penggunaan sumberdaya sudah efektif.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“secara umum penggunaan sumber daya memadai.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“sumber daya program ini digunakan dengan baik.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam program BPNT umumnya dianggap baik dan memadai. Pendamping BPNT dan sekretaris desa mencatat bahwa meskipun penggunaan sumberdaya cukup efektif, masih ada kebutuhan untuk perbaikan dalam efisiensi distribusi dan alokasi sumber daya agar

bantuan lebih tepat sasaran. Sebagian besar masyarakat juga menilai bahwa sumber daya dinilai baik namun perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program.

d.) Cara lain agar proses penyaluran bantuan lebih efisien

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“menggunakan teknologi digital untuk penjadwalan dan pelacakan distribusi dapat meningkatkan efisiensi. Selain itu, meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait akan membantu mengatasi masalah logistik dan distribusi.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“proses penyaluran bisa lebih efisien dengan meningkatkan sistem manajemen data dan memperbaiki infrastruktur distribusi. Pelatihan petugas juga penting agar mereka lebih siap dan terampil dalam menganagani distribusi bantuan.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“menurut saya ya, memperbaiki sistem administrasi dan mempercepat proses pendataan akan sangat membantu dalam penyaluran lebih efisien.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“dari ku kayaknya memperbaiki sistem administrasi supaya penyaluran lebih efisien.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kayaknya semacam penggunaan aplikasi sistem digital untuk memantau distribusi bantuan agar lebih efisien.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“dari saya, bisa proses distribusi lebih ceapat jika ada sistem yang lebih baik untuk mengelola data dari bantuan itu.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebgai berikut:

“ada semacam meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar petugas untuk membuat proses lebih efisien .” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan Program BPNT, beberapa langkah yang perlu diambil. Pendamping BPNT menyarankan penggunaan teknologi digital untuk penjadwalan dan pelacakan distribusi serta meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait untuk mengatasi masalah distribusi. Sekretaris Desa menekankan pentingnya memperbaiki sistem manajemen data, infrastruktur distribusi, dan pelatihan kepada petugas agar mereka lebih siap dan terampil.

Pernyataan masyarakat mendukung saran ini dengan menekankan perlunya perbaikan sistem administrasi, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar petugas.

3. Kecukupan Program

a.) Terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat melalui program BPNT

Pendamping BPNT membrikan pernyataan sebagai berikut:

“kebutuhan dasar masyarakat sebagian besar terpenuhi melalui program BPNT, namun ada beerapa penerima yang merasa jumlah dan kualitas bantuan masih perlu ditingkatkan.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“program BPNT ini cukup membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi ada beberapa aspek yang bisa diperbaiki agar bantuan lebih merata dan mencukupi.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“sebagian besar kebutuhan dasar dari bantuan ini untuk kami sangat terpenuhi.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kebutuhan dasar kami alhamdulillah cukup terbantu dengan adanya program ini.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, program ini sangat membantu mengenai kebutuhan dasar kami.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya, sebagian besar kebutuhan dasar kami terpenuhi, tetapi ada kalanya bantuan tidak cukup terutama untuk keluarga, tetapi saya tidak mempermasalahkan untuk itu.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya sangat membantu, program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar kami.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program BPNT secara umum berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan dasar penerima manfaat. Pendamping BPNT menyatakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat sebagian besar terpenuhi melalui program BPNT, meskipun ada beberapa penerima yang merasa jumlah dan kualitas bantuan masih perlu ditingkatkan.

Sekretaris Desa menambahkan bahwa program ini cukup membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi ada beberapa aspek yang bisa diperbaiki agar bantuan lebih merata dan mencukupi.

Pernyataan dari masyarakat juga menunjukkan bahwa kebutuhan dasar mereka cukup terbantu dengan adanya program ini. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa kebutuhan dasar mereka sangat terpenuhi dan merasa sangat terbantu. Namun, ada juga menyebutkan bahwa bantuan kadang tidak cukup, terutama untuk keluarga besar, meskipun mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut.

b.) Tingkat kepuasan terhadap bantuan yang diberikan:

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“tingkat kepuasan umumnya cukup tinggi, meskipun ada beberapa penerima yang menginginkan peningkatan dalam hal jumlah dan kualitas bantuan.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Secara keseluruhan, penerima manfaat cukup puas dengan bantuan yang diberikan,” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya kami cukup puas dengan bantuan uang diberikan” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“puas, sangat puas saja terhadap bantuan ini,” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“secara keseluruhan cukup puas.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya kami puas dengan bantuan ini.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ya kami merasa sangat puas dengan bantuan yang diberikan” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan penerima manfaat program BPNT secara keseluruhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pernyataan positif yang diberikan oleh pendamping BPNT, Sekretaris Desa, dan beberapa anggota masyarakat.

Pendamping BPNT dan sekretaris Desa mengindikasikan bahwa penerima manfaat secara umum puas dengan bantuan yang diterima. Namun, ada beberapa penerima yang menginginkan peningkatan dalam hal jumlah dan kualitas bantuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kepuasan secara keseluruhan tinggi, ada ruang untuk perbaikan.

Pernyataan masyarakat juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, dengan banyak yang merasa cukup puas atau sangat puas dengan bantuan yang diterima. Tidak ada pernyataan negatif yang mengindikasikan ketidakpuasan yang signifikan.

c.) Aspek dari bantuan yang kurang memadai

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“aspek yang kurang memadai termasuk kuantitas yang tidak selalu konsisten dan jumlah bantuan yang kadang tidak sama dengan penerima manfaat yang lain. (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“beberapa aspek yang perlu diperbaiki adalah kuantitas bantuan dan ketepatan bantuan yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan penerima.”

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“cukup memadai hanya saja saya merasa kurang.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“jumlah bantuan yang diberikan merasa kurang.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“cukup memadai buat saya.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“tidak, buat saya cukup memadai.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“tidak ada buat saya, aman aman saja.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun program BPNT cukup memadai dalam membantu penerima manfaat, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Pendamping BPNT menyatakan bahwa kuantitas bantuan tidak selalu konsisten dan jumlah bantuan kadang tidak sama antara penerima manfaat yang satu dengan yang lain. Sekretaris Desa juga menekankan perlunya perbaikan pada kuantitas bantuan dan ketepatan bantuan yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan penerima.

Masyarkat 1 dan masyarkat 2 merasa bahwa jumlah bantuan yang diberikan kuarng memadai. Namun, masyarkat 3, masyarkat 4,

masyarakat 5 merasa bahawa bantuan yang diterima cukup memadai dan tidak ada masalah yang signifikan.

Secara keseluruhan, program bantuan BPNT telah memberikan bantuan yang cukup memadai bagi penerima manfaat.

d.) Penggunaan bantuan untuk kebutuhan sehari hari

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Penerima manfaat umumnya menggunakan bantuan untuk membeli bahan makanan pokok seperti beras, minyak, dan gula, yang membantu mengurangi beban pengeluaran harian mereka." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, seperti beras dan bahan makanan lainnya, yang sangat penting untuk kesejahteraan sehari-hari penerima." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami menggunakan bantuan untuk membeli bahan makanan pokok, yang sangat membantu dalam mengelola anggaran harian kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan ini kami alokasikan untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari, seperti beras dan minyak, yang sangat penting bagi keluarga kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan makanan dasar, yang membantu mengurangi pengeluaran untuk pangan." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan digunakan untuk membeli bahan makanan pokok, seperti beras dan gula, yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan harian." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan ini kami gunakan untuk membeli bahan makanan utama, yang sangat membantu dalam mengatur anggaran sehari-hari." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan dari Program BPNT umumnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli bahan pokok, seperti beras, minyak, dan gula.

Pendamping BPNT menyatakan bahwa penerima manfaat menggunakan bantuan untuk membeli bahan makan pokok yang membantu mengurangi beban pengeluaran harian mereka. Sekretaris Desa menambahkan bahwa bantuan tersebut sangat penting untuk kesejahteraan sehari – hari penerima karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.

Pernyataan masyarakat juga menunjukkan konsistensi dalam menggunakan bantuan untuk membeli bahan pokok. Masyarakat merasa bahwa bantuan ini sangat membantu dalam mengelola anggaran harian dan memenuhi kebutuhan pangan sehari – hari.

4. Perataan

- a.) Bantuan yang diberikan secara adil diantara semua penerima

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Secara umum, bantuan dibagikan secara adil, meskipun ada beberapa kasus di mana penerima merasa bantuan tidak merata atau tidak mencukupi.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Bantuan umumnya dibagikan dengan adil, namun terkadang ada ketidakpuasan dari beberapa penerima yang merasa bantuan tidak merata.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Bantuan biasanya dibagikan secara adil,” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Secara keseluruhan, bantuan terasa adil, meskipun ada beberapa individu yang merasa mereka tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kami merasa bantuan biasanya adil, tetapi terkadang ada ketidakpuasan karena perbedaan dalam jumlah bantuan yang diterima.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“bantuan sering kali terasa adil.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“bagi saya cukup adil” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan Program BPNT umumnya dianggap adil oleh para penerima manfaat, meskipun terdapat beberapa keetidakpuasan terkait ketidakmerataan atau kekurangan dalam jumlah bantuan. Pendamping BPNT dan Sekretaris Desa mengakui adanya kasus dimana bantuan tidak selalu merata, namun secara keseluruhan, sistem distribusi dianggap adil. Masyarakat juga mencatat bahwa, meski bantuan umumnya adil, ada kalanya perbedaan jumlah bantuan yang diterima menimbulkan ketidakpuasan.

- b.) Keluarga atau individu yang dikenal tidak mendapatkan bantuan
Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Secara umum, hampir semua keluarga yang berhak menerima bantuan sudah terdaftar, meskipun ada beberapa laporan mengenai individu yang merasa tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami belum mendengar banyak laporan tentang keluarga atau individu yang tidak menerima bantuan yang seharusnya, tetapi kami tetap memantau dan mengevaluasi penerima secara berkala." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ada beberapa keluarga yang saya tahu belum menerima bantuan, tetapi itu mungkin karena masalah administratif." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Beberapa individu yang saya kenal belum mendapatkan bantuan, kemungkinan ada kesalahan dalam pendataan atau administrasi." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“saya kurang tau untuk itu” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“saya tidak tau, apakah ada.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ saya kurang mengetahui untuk itu, saya rasa semua mendapatkannya.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keluarga yang berhak menerima bantuan Program BPNT terdaftar dengan baik, meski ada beberapa laporan mengenai individu atau keluarga yang merasa belum menerima bantuan yang seharusnya. Pendamping BPNT menyebutkan adanya laporan terkait ketidakmampuan beberapa individu untuk mendapatkan bantuan, sementara sekretaris Desa mencatat bahwa tidak banyak laporan mengenai hal ini dan bahwa penerima dipantau secara berkala. Beberapa masyarakat melaporkan adanya masalah administratif atau kesalahan dalam pendataan mungkin menyebabkan beberapa individu belum menerima bantuan, namun ada juga beberapa yang tidak mengetahui adanya masalah atau merasa semua telah menerima bantuan.

c.) Menilai proses distribusi bantuan yang diterima

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Proses distribusi bantuan umumnya berjalan lancar, meskipun masih ada beberapa kendala dalam hal waktu dan koordinasi yang perlu diperbaiki." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan Pernyataan sebagai berikut:

“Proses distribusi bantuan cukup efektif, namun ada beberapa kendala terkait waktu dan logistik yang perlu ditangani untuk meningkatkan efisiensi.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“proses distribusi cukup baik menurut saya.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Secara umum, proses distribusi berjalan baik, meskipun ada beberapa masalah terkait jadwal.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“saya menilai proses distribusi cukup baik.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Proses distribusi bantuan umumnya baik, namun ada beberapa kendala terkait waktu” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Proses distribusi umumnya berjalan lancar, tetapi terkadang ada keterlambatan yang perlu diperbaiki.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Proses distribusi bantuan BPNT umumnya berjalan baik. Pendamping BPNT dan sekretaris Desa mengakui bahwa meskipun proses distribusi cukup efektif, masih terdapat kendala terkait waktu dan koordinasi yang perlu diperbaiki. Mayoritas masyarakat juga menilai bahwa proses distribusi

baik, meskipun beberapa menyebutkan adanya masalah dengan jadwal atau keterlambatan yang perlu diperhatikan.

d.) Hal yang dapat ditingkatkan dalam distribusi

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Meningkatkan koordinasi antara lembaga dan memanfaatkan teknologi untuk penjadwalan dan pelacakan distribusi dapat memperbaiki efisiensi distribusi.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Perbaikan dalam sistem manajemen data dan infrastruktur distribusi, serta pelatihan petugas, dapat meningkatkan efisiensi proses distribusi.” (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Peningkatan dalam administrasi dan perencanaan distribusi akan membantu mengurangi keterlambatan” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“ dari saya tidak ada sih” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“memperbaiki system jadwal pengambilan bantuan.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Meningkatkan komunikasi antar petugas dan menggunakan teknologi untuk mendukung distribusi akan meningkatkan efisiensi.” (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Perbaikan dalam sistem administrasi dapat membantu mengurangi masalah yang ada." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Untuk meningkatkan distribusi bantuan BPNT, pendamping BPNT menyarankan peningkatan koordinasi antara lembaga dan pemanfaatan teknologi untuk penjadwalan serta pelacakan distribusi. Sekretaris Desa menekankan perlu perbaikan dalam sistem manajemen data, serta pelatihan petugas

Pernyataan masyarakat juga mendukung saran ini, dengan menekankan pada peningkatan administrasi, perencanaan distribusi dan penggunaan teknologi. Beberapa masyarakat menyarankan perbaikan sistem jadwal dan komunikasi antar petugas.

5. Responsivitas

- a.) Menilai repon pemerintah terhadap keluhan atau masalah yang anda sampaikan terkait program

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Pemerintah cukup responsif terhadap keluhan yang disampaikan, meskipun ada beberapa kasus yang membutuhkan waktu lebih lama untuk ditangani." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa Juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Respon pemerintah cukup baik, namun ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam menangani keluhan secara cepat dan efektif." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Pemerintah biasanya merespon keluhan kami dengan baik, meskipun terkadang butuh waktu untuk menyelesaikannya." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Respon pemerintah cukup memadai, meskipun tidak selalu cepat dalam menangani masalah." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Saya menilai respon pemerintah cukup baik," (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Pemerintah merespon keluhan kami dengan baik, meskipun terkadang ada keterlambatan dalam penanganannya." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Respon pemerintah cukup positif." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah umumnya responsif terhadap keluhan yang disampaikan, dengan tanggapan yang dianggap baik oleh sebagian besar pihak. Pendamping BPNT dan sekretaris Desa mengakui bahwa meskipun pemerintah cukup responsif, masih terdapat kasus memerlukan waktu lebih lama untuk ditangani. Masyarakat juga merasakan bahwa pemerintah umumnya merespon keluhan dengan baik, meskipun ada beberapa kasus keterlambatan dalam penanganannya.

b.) Apakah pemerintah dan pendamping program reponsif terhadap kebutuhan

Masyarakat 1 memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami merasa pemerintah dan pendamping program cukup responsif terhadap kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ya, pemerintah dan pendamping program cukup responsif terhadap kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Pemerintah dan pendamping program cukup responsive." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami merasa pemerintah dan pendamping program cukup responsive." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Secara keseluruhan, pemerintah dan pendamping program cukup responsif terhadap kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dan pendamping program BPNT umumnya responsif terhadap kebutuhan penerima, masyarakat merasakan bahwa pemerintah dan pendamping program merespon dengan baik terhadap kebutuhan mereka, meskipun ada beberapa catatan mengenai keterlambatan dalam penanganan beberapa keluhan.

c.) Masalah yang dihadapi dalam menerima bantuan

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ada beberapa masalah yang dihadapi penerima bantuan, seperti keterlambatan distribusi dan kualitas barang, namun masalah-masalah ini umumnya ditangani dengan baik oleh pemerintah." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Beberapa masalah seperti keterlambatan dan ketidaksesuaian bantuan pernah terjadi, namun pemerintah biasanya menanganinya dengan cepat dan efektif." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami pernah mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan, namun masalah tersebut segera diatasi setelah kami melaporkannya." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ada beberapa masalah seperti bantuan yang tidak sesuai, tetapi pemerintah menanganinya dengan cukup baik setelah kami melaporkan." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Masalah yang dihadapi seperti keterlambatan namun pemerintah biasanya menanganinya dengan baik." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami pernah menghadapi masalah keterlambatan, namun setelah melaporkan, masalah tersebut segera ditangani." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Beberapa masalah seperti ketidaksesuaian bantuan pernah terjadi, tetapi biasanya ditangani dengan cepat oleh pemerintah." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi penerima bantuan, seperti keterlambatan distribusi dan kualitas umumnya ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pendamping BPNT dan Sekretaris Desa mencatat adanya masalah, namun mereka menyatakan bahwa pemerintah biasanya menanggapi dan mengatasi masalah tersebut dengan cepat dan efektif. Masyarakat juga mengalami beberapa masalah, seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian bantuan, namun mereka merasakan bahwa masalah – masalah ini umumnya diatasi dengan baik setelah dilaporkan.

d.) Merasa didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dalam program BPNT

Masyarakat 1 memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami merasa didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dalam program ini." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ya, kami merasa didengar dan diperhatikan oleh pemerintah." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami merasa cukup didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dalam program ini." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Sebagian besar kami merasa didengar dan diperhatikan oleh pemerintah, meskipun ada beberapa yang menginginkan lebih banyak perhatian." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Secara keseluruhan, kami merasa didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dalam program ini." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Spenerima manfaat merasa bahwa mereka cukup didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat umumnya merasa bahwa pemerintah responsif dan perhatian terhadap kebutuhan mereka dalam program ini. Namun , ada beberapa individu yang menginginkan perhatian lebih dari pemerintah.

6. Ketepatan

a.) Kesesuaian bantuan dengan kebutuhan

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan yang diterima sebagian besar sesuai dengan kebutuhan penerima, meskipun ada beberapa yang merasa perlu peningkatan dalam kualitas dan jumlah bantuan." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa Juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Secara umum, bantuan yang diterima cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun ada beberapa yang merasa perlu penyesuaian lebih lanjut." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga amemberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan yang kami terima sesuai dengan kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga amemberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ya, bantuan yang kami terima cukup sesuai dengan kebutuhan." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga amemberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan yang kami terima sesuai dengan kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga amemberikan pernyataan sebagai berikut:

"Sebagian besar bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan, meskipun ada kalanya kurang mencukupi." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga amemberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bantuan yang kami terima cukup sesuai dengan kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan yang diterima umumnya sesuai dengan kebutuhan penerima. Meskipun sebagian besar penerima merasa bantuan yang diberikan sudah memadai, terdapat beberapa individu yang merasa bahwa kualitas atau jumlah bantuan perlu ditingkatan atau disesuaikan.

b.) Menilai ketepatan waktu dan cara penyaluran bantuan

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ketepatan waktu dan cara penyaluran bantuan cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal koordinasi dan distribusi." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebgai berikut:

"Secara keseluruhan, penyaluran bantuan cukup tepat waktu, meskipun ada beberapa kasus keterlambatan yang perlu diperbaiki." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Penyaluran bantuan cukup tepat waktu." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ya, penyaluran bantuan cukup tepat waktu." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ketepatan waktu penyaluran bantuan cukup baik, meskipun ada beberapa kali terjadi keterlambatan." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"ya, Penyaluran bantuan tepat waktu dan cara penyalurannya juga sudah cukup baik." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"ya, penyaluran bantuan tepat waktu." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan dalam Program BPNT dianggap cukup tepat waktu dan memadai. Meskipun ada beberapa kasus keterlambatan dan perbaikan dalam koordinasi serta distribusi yang perlu dilakukan, sebagian besar penerima merasa bahwapenyaluran bantuan telah dilakukan dengan baik.

c.) Kesesuaian bantuan dengan harapan dan kebutuhan

Pendamping desa memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Hasil dari bantuan umumnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima,." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Secara keseluruhan, hasil dari bantuan cukup sesuai dengan harapan, namun ada beberapa yang merasa perlu penyesuaian lebih lanjut." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Hasil dari bantuan ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Ya, hasilnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Hasil dari bantuan ini sesuai dengan harapan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Sebagian besar hasil dari bantuan ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Hasil dari bantuan ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan kami." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil bantuan BPNT umumnya sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima. Meskipun sebagian besar penerima merasa bantuan sudah memenuhi ekspektasi mereka.

- d.) Rekomendasi untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan di masa mendatang

Pendamping BPNT memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Menggunakan teknologi digital untuk penjadwalan dan pelacakan distribusi dapat meningkatkan ketepatan penyaluran. Selain itu, meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait akan membantu mengatasi masalah logistik." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Proses penyaluran bisa lebih efisien dengan meningkatkan sistem manajemen data dan memperbaiki infrastruktur distribusi. Pelatihan petugas juga penting agar mereka lebih siap dan terampil dalam menangani distribusi bantuan." (hasil wawancara 26 Juni 2024)

Masyarakat 1 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Memperbaiki sistem administrasi dan mempercepat proses pendataan akan sangat membantu dalam penyaluran lebih efisien." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 2 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Dari ku kayaknya memperbaiki sistem administrasi supaya penyaluran lebih efisien." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 3 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kayaknya semacam penggunaan aplikasi sistem digital untuk memantau distribusi bantuan agar lebih efisien." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 4 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Bisa proses distribusi lebih cepat jika ada sistem yang lebih baik untuk mengelola data dari bantuan itu." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Masyarakat 5 juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar petugas untuk membuat proses lebih efisien." (hasil wawancara 27 Juni 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan meliputi penggunaan teknologi digital, perbaikan sistem administrasi, peningkatan manajemen data, serta pelatihan dan koordinasi yang lebih baik antar petugas.

Bedasarkan hasil pengamatan dilapangan, penulis melihat bahwa masyarakat yang mendapatkan program ini benar benar masyarakat yang kurang mampu dan berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Melihat dari kriteria ini, maka penulis berpendapat bahwa penyaluran program BPNT di Desa Halong Kecamatan Haruai kabupaten tabalong ini adalah memang yang layak berhak menerima bantuan tersebut.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil Penelitian

Indicator	Kesimpulan wawancara	Hasil
Efektivitas Program	Program BPNT secara signifikan membantu memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi penerima manfaat, meskipun ada kekurangan dalam jumlah dan keterlambatan distribusi.	efektif
Efisiensi Program	Proses penyaluran bantuan BPNT telah berjalan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam mengurangi keterlambatan dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Biaya tambahan bagi penerima manfaat tidak signifikan, dan penggunaan sumber daya sudah cukup optimal dengan beberapa tantangan kecil yang perlu diatasi	Cukup Efisien
Kecukupan Program	Program BPNT umumnya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Meskipun ada beberapa keluhan mengenai kuantitas bantuan yang bisa lebih ditingkatkan, secara keseluruhan program ini sudah berjalan	Terpenuhi Dengan Baik

	dengan baik dan sebagian besar bantuan digunakan untuk membeli bahan makanan pokok yang penting untuk kebutuhan sehari-hari	
Perataan	Bantuan BPNT umumnya dibagikan secara adil, dan proses distribusinya berjalan baik. Meskipun ada laporan mengenai ketidakmerataan bantuan dan beberapa masalah administratif serta kendala waktu, secara keseluruhan distribusi cukup merata. Untuk meningkatkan efisiensi distribusi, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antara lembaga, penggunaan teknologi, sistem administrasi, dan pelatihan petugas.	Cukup Merata
Responsivitas	Pemerintah umumnya merespons keluhan dan kebutuhan terkait program BPNT dengan baik. Meskipun ada beberapa kasus yang memerlukan waktu lebih lama untuk ditangani, pemerintah dan pendamping program dianggap cukup responsif terhadap kebutuhan penerima. Sebagian besar penerima bantuan	Respon Yang baik

	merasa didengar dan diperhatikan oleh pemerintah.	
Ketepatan	Program BPNT umumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima, meskipun ada beberapa yang merasa perlu peningkatan dalam kualitas dan jumlah bantuan. Ketepatan waktu dan cara penyaluran bantuan juga umumnya baik, meskipun terdapat beberapa kasus keterlambatan yang perlu diperbaiki. Sebagian besar penerima merasa bantuan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan di masa mendatang, disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk penjadwalan dan pelacakan distribusi, memperbaiki sistem administrasi dan manajemen data, serta meningkatkan koordinasi dan pelatihan petugas.	Tepat

Sumber: penulis, 2024.

Dengan mayoritas indikator menunjukkan penilaian yang positif, evaluasi program BPNT di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dapat

di kategorikan Baik dalam mencapai tujuannya membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.

C. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang penulis sajikan pada temuan penelitian tersebut.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan Masyarakat yang diperlukan seperti pendamping BPNT, Sekretaris Desa, dan Masyarakat Penerima Manfaat. Data yang telah diperoleh oleh penulis telah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara, observasi di lapangan baik berupa dokumen maupun catatan – catatan yang diperoleh penulis dilapangan guna untuk menunjang sebagai data pendukung pada penelitian ini.

1. Efektivitas

Efektivitas dari kata dasar efektif yang memiliki arti pencapaian akan sebuah keberhasilan guna mencapai keinginan yang telah ditentukan. Efektivitas mengandung hubungan saling terkait dengan hasil yang sungguh-sungguh ingin diraih.

Dengan hasil wawancara mengenai efektivitas program dapat di kategorikan efektif karena terbukti Dari seluruh data dan informasi yang

telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan Masyarakat yang diperlukan seperti pendamping BPNT, Sekretaris Desa, dan Masyarakat Penerima Manfaat. Program BPNT terbukti efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Sebagian penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari – hari seperti untuk membeli beras, dan kebutuhan pangan lainnya. Efektifitas ini penting karena menunjukkan bahwa program BPNT berdampak langsung pada kesejahteraan penerima, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kebutuhan lain yang juga penting. Keberhasilan ini bisa dikaitkan dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang matang, serta pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat miskin di Desa Halong Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.

2. Efisiensi

Efisiensi mengandung arti jumlah usaha yang dibutuhkan dalam mencapai tingkatan tentang seberapa efektif. Efisiensi juga memiliki persamaan arti dengan rasionalitas ekonomi, dua kata tersebut saling keterkaitan antara efektivitas dan hal yang sungguh-sungguh dilakukan dan biasanya tolak ukur dari sebuah efisiensi adalah ongkos atau tarif biaya yang perlu dikeluarkan. Suatu kebijakan dikatakan memenuhi efektivitas yang tinggi apabila dalam hal biaya menggunakan biaya terendah maka dapat dikatakan telah efisien.

Mekanieme penyaluran bantuan yang efisien memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh penerima manfaat tanpa hambatan berarti. Sebagian besar penerima mengapresiasi kecepatan dan keteraturan penyaluran bantuan. Efisiensi dalam penyaluran bantuan ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang digunakan telah dirancang dengan baik, memungkinkan bantuan untuk sampai tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah dengan terpenuhinya suatu kebutuhan yang bisa memberi rasa puas tentang segala sesuatu yang diinginkan. Ketepatan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengetahui suatu tindakan yang berasal dari sebuah kebijaksanaan dalam memenuhi tujuan atau kelebihan dari suatu kegunaan kepada target.

Kecukupan bantuan yang diberikan oleh program BPNT menunjukkan bahwa jenis dan jumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan dasar penerima manfaat. Banyak penerima manfaat yang menyatakan bahwa bantuan pangan yang mereka terima cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini penting karena bantuan yang cukup dapat memastikan bahwa kebutuhan kebutuhan sehari – hari penerima manfaat terpenuhi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Kecukupan ini juga mengurangi kekhawatiran penerima manfaat tentang ketidakpastian pemenuhan kebutuhan dasar

mereka, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

4. Pemerataan

Pemerataan disini mengandung arti sebuah kegunaan dan tarif ongkos yang dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan program, dan apakah suatu hal yang termuat dalam program telah dibagikan sesuai dengan porsi yang sama untuk kalangan-kalangan yang terlibat di dalamnya.

Pemerataan distribusi bantuan menunjukkan bahwa program BPNT berhasil menjangkau sebagian besar keluarga miskin di Desa Halong. Sebagian besar penerima manfaat merasa bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil, meskipun ada beberapa keluhan tentang ketidakadilan kecil. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan bahwa bantuan mencapai semua yang berhak menerima. Pemerataan yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Keluhan tentang ketidakadilan kecil bisa disebabkan oleh faktor, seperti perbedaan dal jumlah atau kualitas bantuan yang diterima, atau perbedaan dalam waktu penyaluran. Menanggapi dan menyelesaikan keluhan – keluhan ini secara cepat dan adil adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatanprogram di masa mendatang.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah suatu tindakan dari dalam pikiran kita untuk memahami dan mengerti tindakan dari pemerintah guna melaksanakan

sebuah pelayanan. Tingkat kepekaan dapat dilihat dari pencapaian hasil oleh pemerintah untuk menjalin sebuah hubungan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Responsivitas juga memberikan pengertian hasil dari keputusan pemerintah apakah telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

Responsivitas yang baik dari pemerintah dalam menangani keluhan penerima manfaat menunjukkan adanya upaya yang kuat untuk memantau dan memperbaiki pelaksanaan program secara terus – menerus. Sebagian besar penerima manfaat menyatakan bahwa mereka dapat dengan mudah melaporkan masalah yang dihadapi, dan bahwa pemerintah atau petugas terkait menanggapi keluhan mereka dengan cepat dan efektif. Tanggapan yang cepat dan baik terhadap masalah yang dihadapi penerima manfaat sangat penting untuk memastikan bahwa program tetap berjalan dengan baik dan efektif. Responsivitas ini juga menunjukkan bahwa ada saluran komunikasi yang baik antara penerima manfaat dan pemerintah, yang memungkinkan penanganan masalah secara cepat dan tepat.

6. Ketepatan

Ketepatan mengandung arti seseorang yang dapat memberikan sebuah petunjuk untuk melakukan sebuah tindakan pada program terkait sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan, atau ketepatan juga dapat dikatakan bahwa dari sebuah program yang terlaksana dari sebuah keputusan pemerintah apakah hasil yang tercapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

Ketepatan jenis dan waktu penyaluran bantuan memastikan bahwa bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagian besar penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan pokok mereka dan bahwa penyaluran bantuan dilakukan tepat waktu setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa program BPNT tidak hanya memberikan bantuan yang bermanfaat tetapi juga melakukannya dengan waktu yang tepat, sehingga dapat memberikan dampak maksimal bagi penerima. Ketepatan dalam penyaluran bantuan juga membantu penerima manfaat dalam merencanakan pengeluaran mereka, karena mereka dapat mengandalkan bantuan dari program BPNT tersebut.

Dengan melakukan perbaikan dan peningkatan di area yang masih memiliki kekurangan, evaluasi kebijakan program BPNT diharapkan dapat terus berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan di desa Halong Kecamatan Haruai, kabupaten Tabalong. Peningkatan ini memastikan bahwa program BPNT tidak hanya membantu penerima manfaat saat ini, tetapi juga dapat beradaptasi dan terus memberikan manfaat yang signifikan di masa mendatang. Keberhasilan program BPNT akan sangat bergantung pada komitmen pemerintahan dan pendukung dari seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program BPNT ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Hasil penelitian ini relevan dengan Penelitian yang dilakukan Wiwit, W., & Kamil, M. (2020) dengan Judul “ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota

Batu” Hasil penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Hasil Penelitian ini juga relevan dengan yang di lakukan oleh Siregar, L. K., Pattimukay, H. V. R., & Waisapy, J. (2023) dengan Judul “ Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon” hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di negeri tawiri kecamatan teluk ambon kota ambon berjalan cukup baik meskipun banyak hambatan yang ditemui.

Hasil Penelitian ini juga relevan dengan yang di lakukan oleh Asrin, A., Achmad, F. Y. N., & Sadat, A. (2022). dengan Judul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Baadia Kota Baubau” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas apabila hasil yang diinginkan telah mencapai tujuan yang dilihat dari ketepatan, kecukupan dan kulalitas; cukup baik dalam meringankan beban pengeluaran serta dari segi kualitas sangat baik dengan KPM yang menyatakan kepuasan terhadap kualitas beras yang mereka dapatkan. Namun, dari keseluruhan dapat disimpulkan belum cukup efektif hal ini dapat dilihat dari penambahan masyarakat miskin. Efisiensi penelitian ini dilihat dari jumlah usaha dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui tingkat pemerataan, waktu dan responsivitas. masih banyak terdapat keluarga penerima manfaat yang belum menangkap maksud tujuan dari program BPNT membuktikan

bahwa kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan ketepatan waktu dimana masyarakat kurang kejelasan dalam waktu penerimaan bantuan yang berarti belum efektif. ada baiknya pemerintah selalu melaksanakan dengan rutin survei lapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak dan tidak sebagai penerima manfaat.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan yang di lakukan oleh Irawan, D. (2021) dengan Judul “ Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabubaten Kuantan Singingi “ Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan tentang indikator Efektifitas penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah baik . Untuk tindakan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat membantu Kebutuhan Pangan bagi masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai didesa pulau aro sudah baik didalam pelaksanaannya. Dan selanjutnya untuk penyaluran pemeberian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah baik dalam memeberikan Program BPNT disetiap bulannya. Jadi dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Evaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Pulau Aro sudah baik sebab Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah tercapai dalam Tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam program BPNT ini. Untuk itu peneliti menilai bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pulau Aro Untuk Indikator Efektifitas sudah berjalan dengan baik di desa pulau aro.

Hasil penelitian ini juga relevan yang di lakukan oleh Sihombing, F. (2022) dengan Judul ” Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi ” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut sangat di sambut baik oleh masyarakat karena masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan mereka masing-masing sehingga tujuan dari program tersebut dapat berjalan yakni untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Halong, Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dapat dikategorikan sebagai program yang baik. Program ini berhasil mencapai tujuannya dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengurangi beban ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Halong, Kecamatan Haruai, kabupaten Tabalong diatas, maka peneliti ingin memberikan saran yaitu:

1. Perbaiki proses distribusi, dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap proses distribusi bantuan BPNT untuk memaastikan efisiensi dan pemerataan yang lebih baik. Paastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
2. Peningkatan komunikasi antara pemerintah, penyelenggara program, masyarakat penerima manfaat untuk memastikan transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan program. Informasi yang jelas dan mudah diakses dapat membantu memperkuat hubungan antara pihak terkait.

3. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan secara terus menerus terhadap pelaksanaan program BPNT, termasuk mengukur dampak program terhadap kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat. Data yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan yang di perlukan dan memastikan kesinambungan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Jurnal of Social Work and Social Service*,.
- Agustina, D. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO. *Journal PUBLIKA*, Vol 10 No 1.
- Asrina, F. Y. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*.
- Budi, W. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Press Gajah Mada.
- Dzulfaroh, A. N. (2023, januari 26). *10 Daerah Termiskin di Indonesia, mana saja?* Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/26/123000565/10-daerah-termiskin-di-indonesia-mana-saja-?Page=all>
- Gultom, H. (2020). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 43.
- Irawan, D. (2021). EVALUASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *JUHANPERAK*.
- Julianto, P. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI. *Qawwam : The Leader's Writing*, Volume 1, No. 1.
- Kalimantanpost. (2023, Maret 31). *2022, Angka Kemiskinan Tabalong Turun 5,87 Persen*. Retrieved from Kalimantan Post Asli Koran Banua: <https://kalimantanpost.com/2023/03/2022-angka-kemiskinan-tabalong-turun-587-persen/>
- Kemenkopmkri. (2019, November 15). *KONSISTENSI PENYALURAN BPNT*. Retrieved from KEMENKO PMK: <https://www.kemenkopmk.go.id/konsistensi-penyaluran-bpnt>
- Kominfo. (2023, february 18). *Bupati Anang Paparkan 3 Langkah Turunkan Kemiskinan Ekstrem*. Retrieved from Portal Tabalong: <https://portal.tabalongkab.go.id/2023/02/bupati-anang-paparkan-3-langkah-turunkan-kemiskinan-ekstrem>
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.

- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Musta'ana, R. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai (Bpnt) dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro). *Journal of Research and Development on Public Policy*, vol.2 no 2.
- Nadhifah, L. R. (2021). Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi . *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*.
- Sihombing, F. (2022). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* .
- Siregar, L. K. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon . *Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI* .
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media.
- Sugiyono, P. D. (2022). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: cv ALFABETA.
- Tiara, R. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya (dejos)*, Volume 3, No 1.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke-1*. Jakarta: Intermedia.
- Widiyanto. (2018). *Evaluasi Pembelajaran*. Madiun: Unipam Press.
- Wiwit. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Made, I. L. (2020). *Metode penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (cetakan pertama). yogyakarta: quaddrant.
- Prof. Dr. H. Kartiwa A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Pustaka SETIA
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Pasolog, H.(2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta CV*.
- Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai. 2019. Jakarta Pusat
- PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNA

LAMPIRAN**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Lampiran foto 1. 1 Wawancara Deangan Sekretaris Desa



Lampiran foto 1. 2 Wawancara Dengan Pendamping BPNT



Lampiran foto 1. 3 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 1



Lampiran foto 1. 4 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 2



Lampiran foto 1. 5 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 3



Lampiran foto 1. 6 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 4



Lampiran foto 1. 7 Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Manfaat 5

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

NO	INDIKATOR EVALUASI	PEDOMAN WAWANCARA	INFORMAN PENELITIAN
1	EFEKTIVITAS PROGRAM	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Anda merasa bantuan yang diberikan melalui program BPNT membantu memenuhi kebutuhan Anda?2. Bagaimana program ini mempengaruhi kesejahteraan Anda dan keluarga?3. Apakah Anda merasa tujuan program ini tercapai dalam membantu kebutuhan dasar Anda?4. Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam menerima bantuan ini?	
2	EFISIENSI PROGRAM	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Anda merasa proses penyaluran bantuan dilakukan dengan cepat dan efisien?	

		<p>2. Apakah ada biaya atau usaha tambahan yang Anda keluarkan untuk menerima bantuan ini?</p> <p>3. Bagaimana Anda menilai penggunaan sumber daya dalam program ini?</p> <p>4. Apakah ada cara yang Anda pikir bisa membuat proses penyaluran bantuan lebih efisien?</p>	
3	KECUKUPAN PROGRAM	<p>1. Apakah kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi melalui program BPNT?</p> <p>2. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap bantuan yang diberikan?</p> <p>3. Apakah ada aspek dari bantuan ini yang menurut Anda kurang memadai? Jika ya, apa saja itu?</p> <p>4. Bagaimana Anda menggunakan bantuan yang</p>	

		diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?	
4	PERATAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda merasa bahwa bantuan yang diberikan dibagikan secara adil di antara semua penerima? 2. Apakah ada keluarga atau individu yang Anda kenal yang tidak menerima bantuan yang seharusnya? 3. Bagaimana anda menilai proses distribusi bantuan yang anda terima? 4. Apakah ada hal yang dapat ditingkatkan dalam distribusi bantuan ini? 	
5	RESPONSIVITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Anda menilai respon pemerintah terhadap keluhan atau masalah yang Anda sampaikan terkait program ini? 2. Apakah Anda merasa pemerintah dan pendamping 	

		<p>program responsif terhadap kebutuhan Anda?</p> <p>3. Apakah Anda pernah menghadapi masalah dalam menerima bantuan, dan bagaimana masalah tersebut ditangani?</p> <p>4. Apakah Anda merasa didengar dan diperhatikan oleh pemerintah dalam program ini?</p>	
6	KETEPATAN	<p>1. Apakah bantuan yang Anda terima sesuai dengan kebutuhan Anda?</p> <p>2. Bagaimana Anda menilai ketepatan waktu dan cara penyaluran bantuan?</p> <p>3. Apakah hasil dari bantuan ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan Anda?</p> <p>4. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan di masa mendatang?</p>	